

8 Poin Prabowo saat Bertemu Media Asing,

Bicara Kecurangan Pemilu

Reporter: Dewi Nurita

Editor: Kukuh S. Wibowo

Selasa, 7 Mei 2019 04:00 WIB



Capres cawapres no urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Salahudin Uno berbincang sebelum melaksanakan ibadah salat jumat pada kunjungannya ke Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh, Jumat 3 Mei 2019. Kunjungan capres dan cawapres nomor urut 02 ke provinsi Aceh pascapemilu 2019 sebagai ungkapan terimakasih kepada masyarakat Aceh yang telah memenangkan pasangan Prabowo-Sandi dengan persentase sementara hingga 91 persen. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

TEMPO.CO, Jakarta-Calon presiden nomor urut 02 [Prabowo](#) Subianto dan tim suksesnya menyampaikan delapan poin saat menggelar pertemuan dengan media asing di kediamannya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Senin sore, 6 Mei 2019. Delapan poin itu berisi daftar panjang tuduhan kecurangan pemilu terhadap Komisi Pemilihan dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku calon presiden inkumben.

Ekonom senior Rizal Ramli mengirimkan delapan poin itu dalam bahasa Inggris kepada *Tempo*, Selasa dini hari, 7 Mei 2019. **Poin pertama**, Prabowo mengatakan bahwa kecurangan pemilu merupakan penghinaan terbesar bagi demokrasi suatu negara.

Baca: [Prabowo Gelar Pertemuan dengan Media Asing](#)

"Begitu fakta terungkap, seorang pemimpin yang mengambil alih kekuasaan lewat pemilihan yang curang, dianggap tidak sah oleh rakyat dan karenanya kehilangan kemampuannya untuk memerintah secara efektif," bunyi penggalan poin pertama Prabowo.

Poin kedua, menyampaikan tuduhan kecurangan pemilu adalah langkah yang serius dan tidak boleh dianggap enteng hanya berdasarkan kecurigaan saja oleh pihak yang kalah. "Itu harus didasarkan pada fakta-fakta," bunyi poin kedua dalam pertemuan itu.

Poin ketiga, Prabowo mengklaim bahwa dirinya bisa menyajikan fakta seperti yang disebutkan di atas. "Kami di sini untuk mengungkapkan kepada Anda bagaimana kami berhasil mengumpulkan bukti yang terdokumentasi, yang menunjukkan bahwa kecurangan pemilu dengan niat jahat memang terjadi dalam pemilu 2019," bunyi poin ketiga Prabowo di hadapan media asing yang diundangnya.

Poin keempat, Prabowo menyebut bukti utama kubunya didasarkan pada penggunaan instrumen sederhana, yakni *smartphone*. Pengamat pemilu dari seluruh negeri dan relawan, ujar dia, telah mengambil foto penghitungan suara yang direkam di masing-masing dari sekitar 800.000 tempat pemungutan suara atau TPS.

Dengan menggunakan foto-foto itu, kubu O2 sejauh ini telah mengaudit hasilnya di 477.000 TPS. "Dan kami telah mengungkap **73.715 kasus data ringkasan C1 yang salah** dimasukkan ke dalam Situng yang merupakan **15,4 persen** dari total yang diaudit hingga saat ini," ujar Prabowo.

Poin kelima, Prabowo menuding ada upaya sistemik oleh pemerintahan Jokowi untuk merusak dan memanipulasi sistem pemilu. Diantaranya, ujar dia, dengan tidak mengundang pemantau internasional yang kredibel, seperti Carter Center dan tidak mendukung IT KPU dengan sistem keamanan yang memadai sehingga dinilai rentan terhadap penipuan siber, serta banyak hal lainnya yang dituduhkan Prabowo kepada pemerintah.

Poin keenam, Prabowo menilai pilpres 2019 begitu rumit karena diselenggarakan serentak bersama pemilihan legislatif. "Mengapa itu dirancang seperti ini oleh pemerintahan Jokowi dan untuk tujuan apa? Pemilihan sebelumnya tidak begitu rumit," ujar dia.

Poin ketujuh, Prabowo mempertanyakan peristiwa kematian hampir 500 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada hari pemilihan. "Tragedi ini lebih besar daripada kecelakaan Boeing 737 Max. Kami berharap pemerintah melakukan penyelidikan serius terhadap masalah ini," ujar dia.

Poin terakhir, Prabowo menyebut dirinya dan tim akan terus mengumpulkan bukti kecurangan pemilu seperti yang mereka sebutkan. "Kita seharusnya tidak melihat cerita ini berakhir pada tanggal 22 Mei. Kita harus menyampaikan kasus ini kepada publik

secara transparan dan membiarkan mereka memutuskan apa yang harus dilakukan," ujar Prabowo di akhir kalimatnya.

Sebelumnya, kubu Prabowo memang gencar menyebut ada kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berang terhadap tuduhan tersebut. Musababnya, ujar Wiranto, pemilu di Indonesia mendapat pujian dari berbagai pimpinan negara di dunia.

"Kok kita sendiri malah menuduh bahwa pemilu itu adanya kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, ditambah brutal lagi. Itu tidak benar. Saya katakan kita benar," ujar Wiranto di kantornya, Jakarta pada Senin, 6 Mei 2019.

Simak: [Wiranto Bantah Ada Kecurangan dalam Pemilu 2019](#)

Badan Pengawas Pemilu juga meminta pihak-pihak yang menuduh demikian melapor sesuai mekanisme hukum yang ada. "Kalau ada laporan dugaan administrasi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, ya, sampaikan kepada kami," ujar Ketua Bawaslu Abhan di Kantornya, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019.

Jika bukti-buktinya kuat, Bawaslu akan menyidangkannya secara terbuka. Sejauh ini Bawaslu belum menemukan atau mendapatkan laporan resmi tentang [kecurangan](#) yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut dia, laporan maupun temuan pelanggaran sebagian besar sudah ditindaklanjuti Bawaslu.